

PENTINGNYA REDEFINISI TENTANG NEGARA MENANGANI KORPORATISME GLOBAL DAN BARBARISME

Drs. Hari Zamharir., M.Si¹

Abstract

As systemic negative impact of global corporatism that makes up monopolistic nature of big corporations, state exists with less and less power. This trend has transformed both State and Society into danger. It seems high time that rethinking and redefining the power of state were initiated and promoted to insure regaining people's sovereignty and proper role of state's power. The paper is an attempt to reconstruct such thinking by prominent thinkers. Method used in the research is both reflective and analytical. Relevant data are gathered through library research. The finding of the study is that there is an urgent need for putting the power of state back in; and that there is a strong demand that state actors and academics in this field to develop a sound approach to make power of state meaningful and effective.

Key words: power of state, re-thinking the philosophy of state, impact of global corporatism.

PENDAHULUAN

Judul makalah ini amat boleh dipengaruhi oleh tesis ilmuwan politik Amerika, Benjamin R. Barber, bahwa konflik global berdarah merupakan persaingan ideologi globalisme, dengan lambangnya McWorld melawan barbarisme, yakni kebudayaan-kebudayaan dan masyarakat yang melakukan pembelaan diri dan melawan dominasi korpoaisme global yang disokong negara lemah. Di tengah berbagai analisis dan spekulasi di sekitar “krisis kapitalisme” yang mengiringi krisis ekonomi global akhir tahun 2008, adalah fakta bahwa hampir semua negara berupaya menopang ekonomi nasionalnya

¹ Penulis adalah Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Peneliti pada LPPM Universitas Nasional. Alamat e-mail: hari_zamharir@yahoo.com

dengan cara menyuntik pendanaan besar-besaran oleh negara. Ada dinamika orang menengok pentingnya peran negara dalam intervensi ke dalam pasar. Ide dasar kaum sosialis diperlukan; ide neo-liberal pasar bebas dimodifikasi. (Sayangnya, Indonesia kedodoran akibat ‘ambur-adulnya’ kekuatan BUMN kita !)

Respon terhadap krisis ekonomi memang lebih kongkrit; tapi, sebenarnya respon lebih fundamental dan perlu jauh jauh hari seharusnya datang dari ide ide dasar kita tentang negara berkenaan dengan “kekejaman peradaban” masa kini.

Rekonstruksi perlu dibuat tahun tahun mutakhir di sekitar pentingnya merumuskan kembali negara di tengah ‘barbarisme’ peradaban modern Barat. Signifikannya re-konsepsi negara didasarkan atas fakta telah bekerjanya konsep negara-bangsa abad ke-18 yang posisi kuatnya diisi dengan ide kemajuan material dan dilepasnya ilmu dari moralitas berbasis metafisik. Juga didasarkan atas salahnya orientasi manusia modern kepada keberlimapahan bendawi (*material affluence*) guna pemenuhan mencari kebahagiaan (*in the pursuit of happiness*) dan filsafat *homo economicus* berbasis humanisme—antroposentris yang bias terhadap rasionalitas berpusat pada keunggulan manusia di atas alam lain. Seiring dengan dengan “percaya kepada ilmu dan teknologi”, agama lalu dipinggirkan dengan pengalaman agama di Barat yakni sebagai agama moralitas dan spiritualitas belaka—tanpa menyodorkan ide ide sosial dan humanitas lain. Di tengah pembelahan kekuatan dunia masa Perang Dingin yang lampau, kita telah saksikan bekerjanya sistem politik global mengasumsikan kuatnya posisi negara dalam kerangka-kerja perang ideologi besar, kapitalis vs. sosialis. Sesudah berakhirnya Perang Dingin akibat bubarnya USSR, posisi Negara diyakini cukup banyak kalangan sebagai sub-ordinasi kekuatan Pasar dengan sebab utamanya pada bekerjanya ideologi ekonomi liberalis yang memberi ruang bebas bergerakinya Pasar di atas negara yang sesedikit mungkin boleh intervensi. Implikasi implikasinya kemudian amat luas akibat lemahnya posisi negara, juga lemahnya badan badan supra negara dalam kerangka-kerja *international governance*. Terlalu kuatnya hegemoni Pasar yang membuat negara tersub-ordinasi dan kemudian amat lemahnya posisi Masyarakat dan negara negara (di luar negara negara besar) telah berakibat bahwa ada praktek-praktek pemaksaan oleh si kaya atas si lemah—tanpa ada pembelaan

oleh entitas koersif semacam negara. Oleh karena ketimpangan ketimpangan ini, tindak terror (*acts of terror*), atau yang kini populer dengan (ideologi) terorisme—baik dalam arti pemaksaan oleh si kuat maupun “pembelaan kultural” segmen segmen Masyarakat yang terpojokkan—lalu bermunculan. Dengan problematik yang dikandung dalam paparan di atas, kita perlu melihat dan merumuskan kembali pentingnya Negara setelah hapusnya Perang Dingin masa kini.

2. Pokok Masalah

Masalah yang dikaji dalam makalah ini adalah bagaimana menangani kekuasaan korporasi global yang begitu mendikte Negara dan Masyarakat dalam aras pemikiran dan konsepsi tentang Negara?

3. Perspektif Teoretis

Ilmuwan politik, tulis Miriam Budiardjo (1992), di samping berkiprah dan berbuat, “harus pula selalu berpikir dan merenung”. (Tentu bagi banyak orang, merenung adalah pekerjaan atau hal yang tak menarik; seperti secara berseloroh dikatakan, mengapa buku filsafat digambar-ilustrasi seorang yang duduk kaku, merenung !). Tapi berpikir dan merenung menjadi hal penting: tesis-tesis yang tepat untuk membuat formulasi masalah dan solusi atas masalah sudah merupakan setengah keberhasilan.

Apa tesis kita tentang gemuruh dan hiruk-pikuk “globalisasi” tahap kedua di abad ini ? Perenungan dan pemikiran di sekitar keberadaan (*civility*) umat manusia kini tentu saja ditantang antara lain dari isu etnosentrisme dan partikularisme: misalnya perenungan dan pemikiran tatanan masyarakat demokratis; apakah konsep demokrasi ini etnosentris atau tidak. Bagi Robert Heffner—antropolog yang “mbalelo” dalam metodologi yang sempit dan kaku—pesimisme mustahilnya demokrasi untuk dicangkok ke kebudayaan non-Barat ditolakannya; mengaku terbiasa dengan filsafat Perancis dan teori politik tahun 1970-an, Hefner merasa optimis atas prospek yang bagus dalam hal persenyawaan Islam dan demokrasi (di Indonesia) yang disebutnya Civil Islam. Pesimisme yang ditolakannya ini dirujuk misalnya ke pandangan Foucault bahwa “konsep-konsep seperti demokrasi dan

demokratisasi adalah konstruksi etnosentris yang bahkan di dunia Barat pun memunculkan proses-proses dominasi dan subordinasi yang hakiki dalam sistem politik ‘demokratik’ “. (Heffner, 2001; 1-13). Optimismenya amat boleh jadi didukung oleh fakta kesejarahan seperti yang ada di belahan bumi lain di luar Barat: Ada bukti atau indikasi akan bagusnya prospek, **yakni civility berupa moderasi dan toleransi Muslim di Afganistan beratus-ratus tahun jauh sebelum tragedi dirobhkannya patung Budha di sana tahun 2001 oleh rezim politik Taliban** – seperti dilukiskan Marimoto Kosei. Ia menulis “.... *The Bamiyan areas had been dominantly Islamic for over 1200 years, yet the statues had stood there safely the whole time , and for centuries they were visited by Buddhists making the pilgrimage from India*” . (Kosei, 2002; 39)

Atau (perenungan dan pemikiran) tentang konsepsi negara. Perenungan dan pemikiran tentang negara didorong antara lain oleh seorang mantan PM Perancis dari Partai Sosialis, Michel Rocard, (2004) yang kini anggota Parlemen Eropa. Keberadaan negara harus dipikirkan kembali; kita jangan sembrono yakin bahwa negara makin tak berarti akibat globalisasi. Formulasi masalah yang dibuat Michel Rocard adalah ini : paradigma abad ke 18 tentang sepremasi eksistensi negara-nasional (*nation – state*)—setelah mencapai prestasi-prestasi kemanusiaan luar biasa—kini mencapai taraf kulminasi, yakni “*the extreme level of barbarism*” (dengan perang tanpa sopan santun, politik tanpa etika, dan kuasa Negara). Meski Rocard tentunya didorong oleh perspektif kaum sosialis (Eropa) pada umumnya, namun kita dapat memberi respons sesuai perspektif kita sebagai masyarakat yang hendak memperbaiki diri.

Barbarisme akibat kuasa Negara-nasional mungkin dikritiknya karena kemunculan kompleksitas susunan masyarakat lintas Negara nasional masa kini dan relasinya dengan Negara berkenaan dengan dinamika kecanggihan IPTEK. Kini konsep lama Negara agaknya kurang memiliki efektifitas—konsep *governance* yang multi dimensional menurut Potucek (dalam kajian tentang dinamika politik Eropa kini) menggantikan konsep lama neo-Weberian tentang Negara (Potucek: 2008, 1). Barbarisme kuasa Negara dihubungkan dengan kuasa korporatisme global yang mendominasi proses pembangunan di berbagai bangsa. Inti isunya adalah etika—baik pada aktor Negara maupun korporasi. Etika—menurut tokoh tokoh seperti Vandana Shiva dari India, dalam pelajaran yang kita dapati di bidang IPTEK dan

sosial politik—terlanjur dipisahkan dari urusan kita dalam program pembangunan dan hidup sosial politik. Keadaan ini merupakan kesalahan kita dalam filsafat ilmu—yang diwariskan pemikir dunia seperti Rene Descartes dan Hume. Shiva menulis dalam “Bio-ethics: A Third World Issue” menjelaskan a.l.

*“The separation of science and technology from ethics is based on the Cartesian divide between **res extensa** (matter) and **res cognitans** (mind), with the objective mind acquiring objective and neutral knowledge of nature. It was also constructed by Hume when he said no logical inference could be drawn from what “is” to what “ought to be”. ‘Hume’s guillotine’ was an effective instrument for separating ethics from science (which in the empiricist and positivist philosophy was supposed to provide an objective view of what ‘is’ (.website: native web org/legal/sihva.html).. Akses 14 Nop 2009.*

Jika governance lebih menjelaskan multi-dimensi fenomena kini dan jika etika dimasukkan ke dalam bangun IPTEK dan Negara, maka Negara nasional di era globalisasi tetap dapat diposisikan memiliki eksistensi yang kuat—tentu Negara nasional yang konseptualisasinya sudah dimodifikasi seiring dengan konsep teoretis governance. Untuk ini, debat di sekitar hilangnya atau tetap bertahannya Negara nasional masa kini hendaknya berkembang ke arah yang lebih baik. Berbagai kalangan seperti Pinder dan Wolf yang melihat bahwa Negara nasional tetap relatif kuat. Pinder dalam bukunya, *The Nation-State, Globalization and Rethinking of Power* a.l. membuat kesimpulan yang melihat tetap eksistensinya Negara nasional—walau Pinder menekankan demi keselamatan modal usaha global:

“As a conclusive remark, I will disclaim frequent references that ‘globalization’ as an irresistible force, has resulted in declining power of the nation-state and as such makes it possible for a new form of stateless sovereignty. Hence, it is necessary to point out that the very importance attached by the international business interests to the World Trade Organization (WTO) clearly attests to the continuing, if not growing. Importance of nation-state in the maintenance of global capital”.

Wolf dalam *Foreign Affairs* Jan/Feb 2001 “Will the Nation-State Survive Globalization ?”. menyatakan hal serupa dengan a.l. menulis “*Global government will of course grow in step with economic integration. But it will actually express and promote, rather than suppress, the interests of nation-states*” Lebih khusus lagi, Negara nasional menjadi penting atau tidak dihitung dari apakah kapasitasnya cukup dapat diandalkan untuk menangani globalisasi. Dalam kasus India, misalnya, apakah kekuatan apa yang disebut nasionalisme Hindu (Hinduvata) akan berfungsi memperbesar kapasitas Negara nasionalnya atau, sebaliknya, malahan menjadi salah satu faktor penghambat ? Dalam makalahnya, Syed Ali Mujtaba (2008) mendaftarkan isu-isu yang berkaitan dengan nasionalisme di era globalisasi di India: Selain isu-isu seperti liberalisasi ekonomi, bunuh diri petani India, nuklir, dan pemanasan global, Mujtaba juga mencatat keberadaan sejenis nasionalisme keagamaan, Hinduvata—yang didefinisikan sebagai “*prominence of Hindu religion in Indian society and its dominance over other religions and culture*” Mujtaba menunjukkan fakta-fakta resistensi dan tensi sosial kultural dan politik yang mengindikasikan bahwa nasionalisme keagamaan itu memperburuk kapasitas Negara nasional India sendiri.

Barbarisme dalam fenomena globalisasi masa kini tertuju pada kekejaman (*violence*) dalam pembangunan di negara-negara berkembang—dan dipandang Shiva sebagai hal yang baru terjadi dan tidak terjadi sebelumnya. Barbarisme kuasa Negara ditimbulkan oleh apa yang Shiva namakan segitiga kekejaman (*violence*): (1) kekejaman dalam upaya menciptakan akumulasi kekayaan; (2) kekejaman dalam ‘perang budaya’; dan (3) kekejaman dalam peperangan militer. (Shiva “The Polarised World of Globalization”. Website: globalpolicy.com. Akses 14 Nop 2009.)

Barbarisme kuasa Negara nasional sebagaimana dikritik Rocard, di era akhir-akhir ini amat dramatis di bawah gendang apa yang dinamakan perang melawan terorisme (*war on terror*—w.o.t.) Frase “perang melawan teror” (plus tindakan nyata) ini pun agaknya makin dipersiapkan keabsahannya, tak kurang dari seorang Hillary Benn, sekretaris pembangunan internasional pemerintah Inggris.

“Mr. Benn told a meeting at a NY based think-tank that the phrase war on terror coined by the Bush administration after Sept 11, could assist small desperate groups with varying ideals by letting them feel

part of something bigger.” (a report by *Guardian Unlimited*, April 16 2007).

Barbarisme, yang dimata Rocard diakibatkan keroposnya filsafat tentang negara, dalam perang melawan teror, juga memaksa pemerintahan Bush untuk memilih kata yang cocok untuk menyebut bahwa perang ini “belum usai”, agar terhindar dari pasal pasal hukum/konvensi internasional. Seperti diberitakan CNN.

“Bush avoided a formal declaration that the war in Iraq was over. A formal declaration of victory, scholars said, carries with it certain obligation under the Geneva Convention and using the word (victory—hz) could invite questions about the continued U.S. presence in Iraq. (CNN. com 2 Mei 2007, “Bush warns war on terror not over”).

Dalam kaitan dengan perang melawan teror, berbagai konsep tentang terorisme pun muncul dan dipakai orang. Salah satu konsep krusial adalah terorisme kaum separatis yang membahayakan integritas nasional suatu Negara. Konsepnya adalah bahwa separatisme pastilah dapat ditambahkan dengan terorisme. Jika kita akses internet. maka wacana dan opini tentang hal ini akan amat bervariasi. Setidaknya ada dua kecenderungan besar dalam melihat separatisme yang dilabeli terorisme: yang satu membuat generalisasi bahwa setiap gerakan atau gejolak etnis di suatu Negara nasional dapat dipandang terorisme separatis; dan satunya melihat kasus per kasus konflik etnis dan daerah—dan tidak otomatis berlabel teroris. Salah satu contoh kecenderungan pertama—yakni generalisasi—adalah pandangan Jagmohan Sikh (2009), dalam kasus deklarasi memerdekakan diri Kosovo di Eropa, bahwa jika Kosovo lepas dari Yugo, maka hal itu menjadi preseden buruk, yakni mengabsahkan gerakan-gerakan separatis. Tindakan pemerintah RRC dalam meredam pergolakan di salah satu propinsi, yakni Xinjiang juga berdasar atas konsep yang diidentifikasi oleh Chan (2002) dalam *World Socialist Web Site* sebagai mirip konsep Bush tentang perang melawan teror, dengan tindakan tindakan pengekangan yang brutal.(Tapi harus segera ditambahkan bahwa propinsi kaya akan SDA ini memang rawan bagi berseterunya kepentingan Negara Negara kuat sehingga konflik kepentingannya menjadi global—yang menjadikan krisis Xinjiang menjadi kompleks, eskalasinya mejadi regional. Bahkan boleh jadi—seperti dianalisis Chan—api dalam sekam Muslim Uighur lalu disulut menjadi api yang

seakan akan demi Islam, padahal di situ ada tangan tangan di luar yang memainkannya. Ada perang berebut sumberdaya. Chan menulis, “*Following the US invasion of Afghanistan and its stationing of US military forces in several Central Asian republics on China’s western borders, Beijing has particularly concerned the the US could possibly exploit Uighur separatism to intervene directly in Xinjiang. Since September 11, China has bolstered its military forces with Afghaniustan*”).

Kedua adalah pandangan kasuistis—misalnya ditunjukkan oleh pandangan Anthony L. Smith dalam tulisannya *Trouble in Thailand’s Muslim South: Separatism, not Global Terrorism* (2004). Intinya dilihat bahwa gejolak di Thailand itu lebih karena faktor dalam negeri—terutama disparitas ekonomi dan ketidakadilan politik pembangunan) dan bukan akibat terorisme global; juga ditulis, “*Judging the violence to be the result of al Qaida, or its regional affiliate Jamaah Islamiya (JI), is premature.*” .

Tingkat barbarisme pada filsafat kita tentang negara agaknya juga tercermin antara lain dari mitos mitos politik—misalnya eksistensi negara Israel. Sedemikian harga mati mitos di sini sehingga komunitas komunitas bangsa Yahudi tidak cukup mampu dan berani untuk membuka wacana ilmiah tentang mitos ini. De-mitologisasi nampaknya terus hidup oleh munculnya ilmuwan ilmuwan keturunan Yahudi yang “hati nurani”-nya diterangkan, antara lain, oleh pertumbuhan kecerdasan berbudayanya. Tokoh seperti Prof. Tanya Reinhart, dari MIT, adalah salah satunya. Seperti dilaporkan Victoria Brittain, (*The Guardian* 21 Mei 2007), dia menjadi salah satu cendekiawan yang menggugah mahasiswa di Tel Aviv (Israel) untuk berfikir cerdas, sampai sampai *mindset* dan hidup sebagian mahasiswa itu memang lalu berubah. “*Those who attended her media studies lecture remember how, amid fierce debate, students’ mindsets and lives were changed by her analysis, encouraging them to read between the lines of their country’s writers.*” **Yang lain dari sepak terjang ibu Reinhart adalah de-mitologisasi eksistensi negara Israel sebagai satu satunya pengharapan komunitas dan masyarakat Yahudi.** Begitu banyak orang Israel punya keyakinan demikian. Negara “modern” seharusnya bukan negara primordial.

But then many of them, like Hannah Arendt or Arthur Koestler, both of whom were... , took their distance on the grounds that it was

already clear to them that Israel) was the kind of state that as a cosmopolitan Jew they couldn't identify with."

4. Negara dan Sistem Global Pasca Perang Dingin

Benar bahwa filsafat (dan teori turunannya) tentang negara-nasional abad ke-18 memang mungkin sudah usang dan membahayakan keadaban. Dalam hal ini, pertanyaan kita adalah apa lokomotif yang memacu proses demokrasi-berkeadaban ini (ketika paradigma kuasa Negara-nasional kini dianggap diruntuhkan oleh globalisasi?). Rocard berteriak, "jangan dibiarkan kekosongan paradigma ini berlangsung!" Jalan simplistik untuk memicu lokomotifnya ini adalah perlunya kesadaran moral perorangan. Itu solusi pertama. Pertanyaannya adalah: Cukupkah itu? Rocard melihat hal itu sebagai tak cukup; lokomotifnya harus paradigma tentang keberadaan Negara (Reason of State).

"But for this trend to truly take hold, good politics needs something more than morals alone. States must begin to explain their toughest actions, those deeds the search for security and the inevitable mistrust among states make necessary. 'Reasons of State' will not disappear entirely. But for democracy to continue its march of ethical progress, state must be submitted to greater public accountability and justification (Rocard, 2004).

Dapatlah kiranya dipahami bahwa isu-isu mendasar dari Rocard di atas mencakup: (1) gugatan terhadap paradigma kuasa negara-bangsa, yang lalu kini, "kosong pemikiran" karena digerus globalisasi; (2) perlunya Negara mempertanggungjawabkan 'mitor-mitos' tentang mempertahankan keamanan nasional—ini berarti menggedor kemapanan cara berpikir pihak-pihak yang bekerja dalam komunitas keamanan (*security community*); (3) mempersoalkan mitos yang dianut oleh mazhab realisme dan tata politik global—ini berarti melibatkan "teori-teori implisit" yang akar-akarnya adalah teologi politik klasik model Augustinus; (4) tugas memikirkan keberadaan dan peran Negara harus menjadi urusan penguasa dan rakyat banyak, orang 'Barat' dan orang 'Timur', orang Afrika yang kelaparan dan orang Eropa Barat yang makmur.

Dalam spirit dan praxis liberalisme (klasik), keadaan 'macam ompong' pada paradigma *nation-state* (akibat digerus oleh globalisme—dan belum tersedianya paradigma baru tentang Negara-dan-kekuasaan) —tentu

saja memunculkan persoalan-persoalan. (Nadia, 1992; 13) dulu sudah mencatat bahwa kehendak liberal–mutlak dalam filsafat liberal Barat masa lalu ‘dikendalikan’ dan didomestifikasi atau dijinakkan oleh eksistensi Negara.

“On the theoretical level, nothing in the liberal principle requires an acceptance of the principle of the nationhood at all, for to a true liberal the autonomous human person is the decisive unit of analysis. The liberal attitude toward nationalism, however, is mediated by the liberal attitude toward the state.

Kini, apa atau siapa yang berposisi mengendalikan kehendak liberal–mutlak ini ? Dalam hal ini, dorongan dan teriakan Rocard untuk rekonsepsi dan ‘reposisi’ Negara-dan-kekuasaan sangatlah mendesak—bukan sebaliknya dibiarkan begitu saja, sementara paradigmanya sudah usang.

Mungkin mirip dengan Thomas Aquinas di masa klasik, Miriam Budiardjo (1992) memberi apresiasi yang ‘layak’ terhadap keberadaan politik kekuasaan (*power politics*). Ibnu Khaldun, di mata Ibu Miriam, kira-kira berkata, “terimalah kenyataan manusia yang berpolitik dan ‘bermain’ dengan kekuasaan (di mana wadahnya adalah Negara); jangan dibenci atau dipandang kotor, tapi jangan pula di-Tuhan-kan.

“Kaitan antara kehidupan politik dan kehidupan ekonomi dalam pemikiran Ibnu Khaldun tampak tepat sekali”—demikian tulis Miriam Budiardjo lagi. *Topic sentence* suatu paragraf dari tulisan Ibu Miriam di atas kiranya amatlah penting. Ini terutama berkaitan dengan fakta bahwa politik kini makin “meluas” konsepnya memasuki ‘wilayah’ ekonomi—sebagaimana ditandai dengan bidang-bidang kajian ilmu politik yang disebut ekonomi politik (*political economy*) dan perbandingan politik (*comparative politics*). Mengapresiasi pandangan ilmuwan klasik Muslim, Ibnu Khaldun, tentang jatuh-bangunnya Negara, Ibu Miriam Budiardjo, ilmuwan politik terkemuka Indonesia, menulis bahwa sukses ekonomi cenderung membuat manusia lupa diri sedemikian rupa hingga manusia kehilangan kemuliaan sebagai manusia.

“Dan kalau manusia telah kehilangan moral yang terpuji dan kehidupan agama yang suci, sebenarnya ia telah kehilangan *raison d’atre*-nya sebagai manusia dalam kehidupan ini Apabila saat-saat seperti ini telah datang, bagi Ibnu Khaldun ini sebenarnya juga

suatu pertanda yang telah datang memberitahukan bahwa masa tatanan politik yang lama, yang kini berada di pentas sejarah, telah hampir berakhir, dan saat kedatangan aktor yang baru, yang lebih muda, lebih bersemangat, lebih merasa terikat kepada kaidah-kaidah moral dan negara, seperti solidaritas yang kuat dan kesederhanaan dalam hidup, telah berada diambang pintu”. (Budiardjo, 1992; xviii).

Masalah di sini mencakup pertanyaan “*political economy* yang mana ?” (berkenaan dengan rapuhnya konsepsi negara bangsa abad ke 18 ? Juga pertanyaan “*comparative politics* yang mana ?” Ekonomi politik dan politik perbandingan yang dikemas dalam asumsi asumsi mengenai konsep negara-bangsa akan membawa kita ke arah hegemoni ilmu berideologi neo-lib jika kita mengikuti arus utama ilmu sosial dan politik mapan; atau hegemoni neo-Marxis jika kita ke kiri-kirian. Pemikiran pemikiran baru, misalnya, tentang Negara kiranya dapat lebih membebaskan diri dari tradisi keilmuan yang neo-lib atau neo-Marxis sedemikian itu.

Konsep negara (*State*) dalam tulisan ini **bukan dalam konseptualisasi ‘sempit’ yang dianut segolongan ilmuwan politik beraliran *statists***; sebaliknya, negara di sini sebagai bagian yang luas dari konsep kekuasaan dalam ilmu politik yang dianut oleh ilmuwan politik yang mementingkan kajian politik sebagai gejala kekuasaan, “yang memiliki cakupan yang amat luas, yang di dalamnya termasuk hampir semua hubungan yang terdapat dalam masyarakat manusia. Argumen penganut konsep kekuasaan antara lain “negara (pemerintahan dan kenegaraan) pada hakikatnya tak lebih dari wadah atau kulit luar, dan bukan inti atau pokok permasalahan yang sesungguhnya dalam ilmu politik itu” (Zainuddin, 1992; 3-5). Signifikannya konsep kekuasaan dirujuknya kepada Lasswell dan Kaplan (1950)—terlepas dari persoalan apakah konsp kekuasaan sudah dibuat jelas pengertiannya, sebab Varma melihat bahwa para teoretisi kekuasaan tidak berhasil membedakan antara *power* dan *authority*.(Varma; 2007, 244) Memudarnya negara masa kini dimaknai secara berbeda antara pendekatan Marxis dan globalists. Kedudukan instrumental negara di mata kaum Marxis dikoreksi oleh neo-Marxis, yang melihat signifikannya negara sebagai arena.

Dengan posisi ini, maka Negara (dengan huruf besar). dimaksudkan konsep yang luas. Konsep Negara jadinya—untuk terhindar dari debat lama

para ilmuwan seperti disebut Rahman Zainuddin—lebih baik diistilahkan Negara-dan-kekuasaan—yang dikandung baik isi maupun wadahnya.

Mengingat signifikannya konsep kekuasaan dan cukup sukarnya pemilihan istilah, maka ada yang membuatkan satu kapling untuk diisi dengan beberapa istilah yang merujuk ke maksud “kekuasaan”. Kapling untuk mewadahi beberapa konsep itu dikotakkan ke *competing concepts and terms*. Zainuddin menulis bahwa:

“pertarungan antara kedua konsep (negara vs. kekuasaan) itu, yang mungkin telah berkejolak selama lebih dari satu abad sampai sekarang, tampaknya belum selesai juga kekuasaan terdapat dalam masyarakat dalam berbagai bentuk dan intensitas, sehingga ia muncul di bawah berbagai label dan nama, seperti kekuasaan, pengaruh kontrol, pemerintahan (*rule*) dan lain-lain. Ia juga mengutip pendapat Dahl bahwa semua istilah itu dapat dikelompokkan di bawah satu nama saja, yaitu apa yang disebutnya dengan *power terms* (.....) atau *influence terms* (.....) (Zainuddin, 1992; 9).

Dengan diterimanya ide bahwa konsep Negara-dan-kekuasaan demikian itu, maka hal hal yang dicakup ketika membicarakan Negara-dan-kekuasaan akan melibatkan bentuk bentuk interaksi seperti di bawah ini: Relasi-relasi dan interaksi aspek dan atau entitas sebagai berikut: Negara vis-à-vis korporasi; Negara—korporasi—masyarakat; Masyarakat—negara lain; relasi politik—ekonomi; relasi *power politics*—dinamika masyarakat; dan relasi *international goveranance* vis-à-vis Negara nasional. Dengan berbagai entitas kelompok dan sektor yang saling berinteraksi di atas, kita dapat sepakat dengan Varma bahwa teori teori elit, teori kelompok, maupun teori kekuasaan tidaklah mencukupi (Varma; 2007, 250-2)—tapi agaknya sekedar saling melengkapi—untuk dapat memberi penjelasan tentang hakekat kehidupan politik, apalagi interaksi global dan posisi Negara. Dilihat oleh para ahli hubungan internasional yang melihat fenomena sebagai suatu sistem, beralihnya sistem bipolar ke sistem lain—sebut saja multi polar, sistem hierarki internasional, atau sistem veto (Varma; 2007. 330-331)—pesoalan pokoknya adalah seberapa efektif aktor nasional di situasi situasi yang baru itu dan isunya adalah apakah arti Negara akan dilihat kembali. Baik kaum globalist maupun anti-globalist beradu argumen untuk memberi jawab atas masalah ini. Lebih dari itu, gejala kegairahan begitu banyak

segmen bangsa bangsa Amerika Latin untuk “menghindar diri” dari politik dominasi Kapitalisme memberi kita pelajaran bahwa Negara bagaimanapun tetap perlu dipikirkan dasar dasar keberadaannya, bukan sebaliknya dibiarkan “tertelan” oleh sistem sistem hegemonic dan dominasi. Agaknya, keberadaan negara harus didefinisikan kembali mengatasi tantangan baru tersebut.

Seiring dengan teriakan Rocard, pemikir politik Amerika seperti Friedmann juga melihat bahwa dari perspektif sistem, globalisasi adalah sitem politik baru, yang lebih merupakan pengganti sistem politik internasional atas sistem lama —sistem politik Perang Dingin. globalisasi bukanlah dominannya ‘benturan’ antar peradaban. Dalam formasi sistemik ini, keberadaan *power of states* tetap signifikan. Jadi globalisasi menyajikan **konsep sistem internasional** (Friedmann: 1999; i-xxi). Dalam kaitan ini, mungkin perlu dicatat di sini bahwa hakekat globalisasi sendiri menjadi kontroversi: arus utama melihat bekerjanya model pro pasar yakni bekerjanya tiga daya-dorong (*drives*), yakni informasi, Pasar dan teknologi. Arus utama ini tergolong ke dalam pihak yang mendukung globalisasi atau kelompok globalis. Sebagian lain melihat peranan signifikan satu daya dorong lain yakni *human-driven* (seperti dilihat Amartya Sen, dan konsep *human agency* dari Giddens).

Pentingnya re-konsepsi Negara terasa begitu mendesak di politik Indonesia masa kini: Negara menjadi ompong seperti diindikasi oleh fakta bahwa Negara cenderung lepas tangan atas konflik konflik SARA terutama agama (Murbawi: 2007). Namun di sisi lain, Negara diposisikan terlalu kuat oleh otoritas keamanan kita—setidaknya dalam kasus polemik rencana mengundang keamanan Negara tahun 2000an lalu (Anggoro dalam Luwarso, 2001; ix – xxvi). Dari buku *Negara Dalam bahaya: Kontroversi Seputar RUU PKB*, ditunjukkan Luwarso dan Anggoro akan indikasi kuat tentang fakta bahwa dalam isu keefektifan Negara, di satu sisi kita terlalu lemah dalam politik kesejahteraan; tetapi di sisi lain kita lemah dalam kapasitas Negara menangani perubahan sosial yang ada. Dan sebagai jalan keluarnya digunakanlah pendekatan cara cara represif karena kecilnya kapasitas Negara vis-à-vis tantangan yang besar. Agaknya Negara terlalu ingin ‘otonom’ bukan dalam rangka keseriusan politik kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak. Tapi, sebaliknya, banyak pemegang otoritas dalam *security community* merasa paling tahu tentang masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam arti ada ide bahwa keamanan perlu terjamin

demikian berlangsungnya pembangunan. Tulis Luwarso, “Pakar hukum tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr. Mahfud MD (dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi—HZ) dengan lugas mengatakan bahwa jika RUU itu disetujui, dikhawatirkan bakal terjadi *state terrorism* yakni terorisme Negara yang dilakukan oleh militer” (Luwarso, 2001; 65). Jika rezim politik dalam politik kesejahteraan (dengan tidak bersembunyi menutupi kecilnya kapasitas Negara ke dalam pendekatan keamanan), maka tugas yang juga harus ditangani adalah tentang keberadaan Negara perlu diperkuat landasan untuk bertindak secara adil..

Kemauan dan kemampuan untuk secara efektif memperbesar kapasitas untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sedemikian itu menjadi tantangan nyata karena dalam praktek, banyak aktor Negara justru lemah di bidang etika sosial dan politik ini. Berbagai penulis seperti Faisal Baasir, Benny Susetyo dan Prof. T. Jacob telah menyuarakan rasa prihatin yang mendalam atas krisis kita tersebut. Negara boleh saja berhasil membuat aturan normative seperti TAP MPR Nomor VI Tahun 2002 tentang Etika Kehidupan Berbangsa (EKB) dan yang sebelumnya—seperti diakui oleh Faisal Baasir, seorang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan—disadari “perlunya suatu panduan Etika Berbangsa dan Bernegara” di tengah krisis Indonesia masa kini (Baasir’ 2003; xxix). Kenyataan menunjukkan bahwa kehendak tertulis dan produk kenegaraan yang normative itu tetap masih menjadi macan ompong sampai dengan tahun 2009 ini: Praktek praktek buruk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan Negara tercium baunya dengan keras di sekitar kontroversi perkelahian institusi Negara POLRI dengan *auxiliary agency* Negara yang bertugas membrantas korupsi kelas kakap, KPK. Pesan moral dari Susetyo berikut tentunya dianggap angin lalu belaka oleh para pecundang di berbagai aktor Negara kita: “Maka kita perlu mempertanyakan moralitas kebangsaan kita..., (dengan jalan—HZ) membela kaum tertindas, bersikap altruistik dengan mementingkan kepentingan masyarakat banyak dengan dengan mendasarkan diri pada nilai nilai humanisme” (Susetyo, 2004; 4); “Peradaban, bagaimana pun juga, harus memiliki kandungan moral yang bisa dipertanggungjawabkan dihadapan nilai-nilai humanisme” (Susetyo, 2004; 172). Secara khusus, T. Jacob amat prihatin berjangkitnya kleptokrasi pada Negara kesatuan kita. Kita dapat menangkap jiwa keprihatin mendalam dari Prof. Emeritus dari UGM ini—setidaknya karena Jacob bukan ahli teori politik atau ahli hukum, tapi

antropologi. “Inti kleptokrasi adalah memindahkan kekayaan nasional dari rakyat kepada lapisan atas kekuasaan: politikus dan birokrasi, militer dan polisi, pengusaha dan pemilik modal” (Jacob, 2004; 14) beberapa judul kumpulan karangannya a.l. “Negara yang beringas” (hlm. 11-13); “Negara jungkir balik: lurus jadi kurus, menyimpang malah kenyang” (hlm. 19-21); dan “Jihad lawan korupsi” (hlm. 22-24). Bukunya mencerminkan catatan seorang patriot yang perwira demi melihat kondisi buruk negeri ini pada saat saat usia senjanya—padahal ia juga saksi sejarah berdirinya Republik Indonesia.

Greget yang dibawa Rocard di atas dalam konteks Indonesia nampaknya akan menghadapi resistensi cara berpikir. Mengapa ? Karena dalam mode produksi ilmu kita, kita masih menghadapi kontroversi lama “netralisasi Pancasila dari agama”, yang merujuk ke gagasan Negara bangsa abad 18. Kita masih berkuat pada kontroversi “Pancasila harus netral dari agama”—satu term yang konseptualisasi dalam kalangan *main stream* condong ke arah model sekuler atau pemisahan agama dari Politik/Negara. Netralisasi agama bagaikan ibu yang bakal melahirkan jabang bayi jaman Aufklarung (Pencerahan). Filsuf-filsuf jaman Aufklarung abad 18 ini mulai menyerang agama atas nama akal budi....” (Sindhunata, 83; 101)

Pandangan korektif terhadap negara-bangsa yang dijauhkan dari etika sebenarnya juga disuarakan filsuf-teolog Kristiani, Paul Tillich di tahun 50-an. Namun pandangan ini tentu saja dianggap angin lalu di tengah hiruk pikuk adopsi gagasan negara-bangsa abad 18 di mana mana. Tillich pada analisis akhir melihat:

“Dalam elaborasi yang paling radikal sekalipun, manusia dengan potensi rasionalitasnya niscaya tidak akan pernah dapat teralienasikan dari anasir-anasir spiritualitasnya. Sebagai misal..., atau pun Karl Marx dengan ateisme sosial-politiknya, kesemuanya tidak pernah dapat berlabuh di kota-kota bandar kehidupan yang betul-betul steril dari wujud Tuhan”. (Tillich, 1959; v)

Dalam hal keperluan integrasi negara-bangsa dan etika ini, masalah fundamental kita adalah bahwa kita terlanjur “menyerahkan” norma dan etika Negara kepada kuasa Negara nasional dan kedua, filsafat etika kita, menurut para kritikus seperti Shiva dan Shomali, terjebak pada konsep teoretis memandulkan multi-dimensional kita.: Shiva merujuk ke dipisahkannya

IPTEK dari etika sedangkan Shomali, (yang menerbitkan bukunya tahun 2001 di London, Inggris) merujuk pada kekeliruan teori relativisme etika— yang dalam kebebasan Negara nasional agaknya memberi ruang terbuka bagi Negara untuk terbebas dari penilaian etis oleh warganya atas dasar yang kuat. Lesser (dalam Shomali, 2005) dalam “Pengantar” untuk buku Shomali menulis a.l.

“Dalam buku ini, Dr. Shomali membantu menunjukkan bahwa tak ada bentuk relativisme yang dapat dipertahankan sehingga mestilah ada suatu dasar obyektif bagi moralitas. Ia telah merintis langkah pertama bagi terbentuknya dasar tersebut. Beberapa tahun silam, buku semacam ini sangat berlawanan dengan tren filosofis. Namun waktu telah berubah, dan buku ini benar-benar jadi bagian dari sebuah gerakan yang tengah tumbuh. Gerakan ini, hemat saya, bergabung dalam arah yang benar ! “

Shomali dalam Bab II memaparkan sejarah paham relativisme etika dari zaman kuno, lalu zaman modern yang diwakili Montagne, Hume dan Nietzsche, serta zaman akhir ini, yang diwakili tokoh seperti Ruth Benedict, G Harman dan JP Sartre. Dalam kesimpulan kajiannya, Shomali menegaskan kembali kritiknya terhadap paham relativisme etika dan perlunya mengembangkan teori yang layak. Dan bahwa “solusi akhir bagi persoalan mendasar adalah mengembangkan teori yang secara substansial berbeda tentang dasar dasar moralitas, yang menemukan hakekat moralitas, menghargai semua aspek pengalaman moral kita, dan menempatkan moralitas pada tempat sebenarnya.” (Shomali, 2005; 335)

Ilmuwan Perancis, Alexis de Tocqueville, yang dikenal “memotret” demokrasi Amerika pun sudah menyebut hubungan nilai agama dengan pertumbuhan demokrasi Barat. Hingga kini pun ilmuwan seperti Michael Novak, ketua pada George Frederick Jewett in Religion and Public Policy dari American Enterprise Institute, Washington D.C. dan pemikir tentang kebebasan (*liberty*) tetap merujuk ke ‘temuan’ Tocqueville di atas. **Liberty, baginya adalah hal yang lebih penting ketimbang demokrasi.** Ketika diwawancara tahun 2006, Novak menyebut bahwa lembaga bisnis sebagai lembaga nomor dua dalam demokrasi; ia lalu menjelaskan bahwa lembaga pertamanya adalah agama—ini senada dengan ‘temuan’ Tocqueville. (Novak, 2006; 97).

Apa artinya ini semua ? Semestinya para ilmuwan sosial di Indonesia tidak lagi terus-menerus terperangkap pada ‘hegemoni’ ilmu produk pemikiran rasional-sekuler abad ke-18 terutama tentang eksistensi negaranasional yang ‘dibebaskan’ dari fatsun dan etika politik. Agaknya pengisian konsepsi baru Negara-dan-kekuasaan pasca konsep negara-bangsa abad 18 harus mempertimbangkan integrasi etika berbasis agama. Kasus sukses Malaysia yang tidak perlu berkontroversi untuk men-sekularkan sistem kenegaraan Malaysia sepertinya dapat kita bayangkan tentang persetujuan Paul Tillich tentang pautan spiritualitas dan rasionalitas, tentang hidup profan dan kaitan ber-Tuhan. Ini dapat dipetik pelajarannya bagi para pemimpin bangsa di Indonesia yang cenderung tergila gila dengan netralitas Pancasila, atau terlalu dihindangi sakit ketakutan akibat terjadinya ‘perang ideologis’ masa lampau antara Pancasila sebagai ideologi negara dengan Islam sebagai ideologi negara. Polemik tentang sekuler vs Islam yang muncul lagi akhir 1990-an merefleksikan kemunduran ini. (Demikian pula di Turki hari ini “perang” kaum sekularis dengan militernya di depan vs. partai Islamis. Kedua kubu terjebak pada dua jalan yang ekstrim—hal yang dampak negatifnya amat merugikan bangsa Turki sendiri !). Polemik berlangsung di media massa yang melibatkan ilmuwan dan tokoh seperti Denny JA dan Sumargono. Polemik bermula dari tulisan Denny JA, “Pelajaran dari Turki: Mengendalikan Politisasi Agama”, (*Kompas*, 15 Mei 1997), dan kemudian ditanggapi A Sumargono, “Negara Sekuler: Tanggapan atas Tulisan Denny JA” (*Republika*, 24 Juni 1997). Polemik dan unjuk kekuatan muncul lagi tahun 2006 ini antara kekuatan besar “agamis” vs. “sekuler”. Sekali lagi, kita masih sama sama terjebak pada mitos mitos abad ke-18—seperti diingatkan Rocard.

Menimbang etika berarti juga mengkritisi keberadaan ideologi yang implisit maupun eksplisit. Menggugat cara cara membangun bangsa juga mencakup perlunya kesadaran kritis ketika aktor negara “mengadopsi” resep resep pembangunan dari badan badan dunia dan “mencerna” gagasan gagasan memperbaiki tata gaul global. Peluang dan kemauan untuk memperbaiki tata gaul global secara paradigma diperlukan, terutama karena mudarnya konsep negara-bangsa abad 18. Kita jangan masuk jurang akibat ideologi implisit yang dibawa ahli ekonomi tingkat dunia. Stiglitz (2002), misalnya, dengan penuh semangat dan kegetiran membeberkan

“kecerobohan” para ahli yang bekerja di badan badan dunia tempat ia pernah berkiprah.

“...unfortunately though hardly surprisingly, in my time in the White House as a member of..., and at the World Bank, I saw that decisions were often made because of ideology and politics. As a result many wrong-headed actions were taken”.

Dalam kutipan ini ada indikasi kuat bahwa kebijakan luar negeri atau bantuan luar negeri dari negara maju atau badan badan dunia dirumuskan secara ceroboh dan terlalu berbasis atas pertimbangan ideologi dan politik; jadi, besar kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan di banyak negara berkembang. Pada isu lain Stiglitz juga melihat tidak-cocoknya strategi reformasi yang “terlampau cepat” dan perlunya strategi bertahap (Stiglitz, 2002; 1x-xvi)

Barbarisme mungkin sekali masuk pula pada semangat mengekspor demokrasi. Kita ambil tata global melalui badan badan dunia. Salah satu kendala moral dan kultural adalah bahwa di sana praktek demokrasi belum dapat terwujud. Tantangan berat ini diakui / diamati Dahl (2001;158-163). Ia skeptis bahwa demokrasi pada *international governance* (di mana *states governments* pada level nasional juga berhimpitan dan berinteraksi) dapat lebih cepat diwujudkan. Robert A. Dahl dengan subjudul “Dapatkah organisasi-organisasi internasional menjadi demokratis ?” menilai dan memprediksi bahwa perlu waktu lama untuk membuat mereka demokratis. Yang mungkin cukup mengejutkan adalah bahwa Dahl hampir hampir tak menyebut signifikannya faktor korporasi global dalam pengaruh non-demokratis di sana. Memang institusi DK PBB pun mencerminkan kekuatan non-demokrasi pada *international governance*: ada demos anak emas, ada demos anak tiri; ada suara menentukan dan ada suara saran. Kelembagaan PBB sendiri secara umum berada di antara kekuatan reformis (yang ingin mendemokratiskan) lawan “minoritas” yang ingin bertahan pada status quo. Tulisan Robin Cook dari Guardian News service/London *The Jakarta Post*, 7 April 2006, di bawah judul “Why U.S. neocons dislike Kofi Annan”, misalnya, secara amat bersemangat menyayangkan sikap garis politik konservatif administrasi AS masa masa kini, yang menghalang-halangi paket reformasi Sekjen PBB itu, dengan taktik dan strategi untuk membuat PBB sebagai institusi yang tak bergigi alias macan ompong. Tulis Cook “*The*

suspicion might be that they would have a creaking, ineffective UN to treat as a coconut shy than a modern, representative forum that would oblige them to respect collective decision.”

Jika skeptisme sedemikian itu memang sesuai kenyataan faktual di lapangan, maka implikasinya nyata di depan mata : sebut saja masalah kemiskinan dan kelaparan di Benua Afrika, yang tak kunjung diatasi oleh sistem internasional yang didominasi *vested interest* orang kaya di negara-negara kaya.

‘Kekosongan paradigma’ tentang Negara-dan-kekuasaan demikian itu bagi pengalaman masyarakat negara-negara Eropa Barat dan AS mungkin tak menjadi persoalan mendesak—cukup misalnya dengan gagasan tentang perbaikan tambal sulam dan bertahap (*piece meal engineering, incremental change*) tanpa perlu untuk merombak total tata sos-pol dan ekonomi atas nama ide(ologi) besar seperti sosialisme. Atau cukup misalnya dengan *open society* untuk memperbaharui kapitalisme.

Tapi bagi negara Dunia Ketiga dan negara berkembang, ‘kekosongan paradigma’ tentang Negara-dan-kekuasaan menjadi mendesak. Urgensi ini secara kasat mata diindikasikan oleh fakta, misalnya, di dunia korporasi—yang atas nama ide(ologi) pasar bebas dan neo-lib memposisikan mereka berkuasa atas kuasa Negara. “Gula-gula” atau permen yang dinamakan CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk konteks negara berkembang menjadi berdimesni amat kuasa politik; di lain sisi CSR tak lebih dari uluran tangan sekedarnya sesuai selera penguasa sektor korporat yang bersangkutan. Di negara berkembang CSR terlalu “memainkan” Negara, karena kelemahan kelemahan aktor negara (Riyadi, 2007) dan, seperti kritik Rocard, kosongnya paradigma Negara pasca negara-nasional. Pertanyaan penting dalam kajian tentang re-konsepsi Negara di era globalisasi adalah ini : konflik global itu dimana *locus*-nya –apakah di dalam negeri atau internasional? Penjelasan Miaill mungkin memadai: letaknya berhimpitan di antara keduanya, “*International social conflicts* didefinisikan Miaill sebagai “*conflicts that are neither pure international (interstate) conflicts, nor pure social (domestic) conflicts but sprawl somewhere between the two*”. (Miaill, 1999, 77).

Seiring dengan kelangkaan pemikiran paradigmatis untuk memperbaharui konsepsi Negara pasca negara bangsa abad 18—sebagaimana ajakan Rocard di atas, konsep teoretis dan paradigma *civil society*, misalnya, dalam dunia akademik tak lebih dari deskripsi dan *explanatory* terhadap fakta atau realitas empiris suatu masyarakat di suatu kurun—tapi tak berdaya penjas memperbaiki paradigma Negara pasca negara-bangsa yang kini ompong. *Civil society* baik ontologis maupun paradigma—apakah itu konsep klasik yang berpusat pada Negara, masa modern berupa masyarakat bertumpu pada kuasa Pasar, maupun masa kini yang kekiri-kirian (neo-Marxis) yang skeptis terhadap—baik kuasa Pasar dan maupun kebaikan Negara—dan yang kanan atau neo-lib (Tumin & Nurhadi, 2007;348-360), lalu diserahkan isinya kepada selera suatu bangsa /peradaban untuk memilih dan mengisinya sendiri sendiri—yang dalam hal paradigma Negara-dan-kekuasaan, jadinya, lagi lagi diserahkan kepada masing masing budaya untuk mengisinya. *Civil society* nampaknya tak lebih dari ‘rumah kosong—siap isi’ yang dapat diisi dengan deskripsi; ia kosong dari preskripsi. Jika ada tiga domain yang berhimpitan model bola atau lingkaran Venn—State, Market, dan Society—maka ‘rumah kosong—siap isi’ *civil society* masih terlalu sibuk dengan *positioning* dirinya sendiri dan konseptualisasi serta pemberdayaan dirinya. Sementara itu konsep ompong negara-bangsa yang sudah menunggu konsep baru tentang Negara-dan-kekuasaan tidak kunjung diberikan wacana oleh pegiat *civil society* untuk mencari solusinya.

Urgensi ini juga mengingatkan bahwa di berbagai bagian dunia ketiga, di sana sini terjadi kebingungan dalam adopsi teori sosial politik. Almond (1987) memperlihatkan dilema yang dihadapi para ilmuwan politik di bidang pembangunan politik. Teoretisasi mula mula dipreskripsikan bahwa bangsa bangsa di dunia ketiga hendaknya mengatasi krisis pembangunan bangsa secara tahap demi tahap, yakni identitas nasional, legitimasi, partisipasi, penetrasi, dan distribusi. Rekomendasi ini kemudian diperbaiki oleh beberapa ilmuwan, yakni bahwa tidak perlu bertahap dengan urutan tersebut di atas koreksi ini menjadi salah satu “kemajuan” yang dicapai oleh beberapa sarjana yang dicatat Almond. Maksudnya, dalam pembangunan politik, tidak ada keharusan bahwa suatu bangsa memulai dengan penanganan krisis identitas, lalu masalah legitimasi, dan seterusnya dari lima krisis di atas. Kasus kedua adalah konsep modernisasi (politik): pada awal 1950-an banyak negara dunia ketiga mengadopsi modernisasi politik dalam arti “membuang yang lama”

dan menggantinya dengan yang baru (nilai dan institusi modern Barat); lalu mazhab revisionisme memberi resep korektif bahwa “yang lama” dapat dikandung segi segi modernitas, jadi jangan dibuang.

Urgensi ini juga dikaitkan dengan kenyataan bahwa terjadi solusi yang salah di segi terlalu kuatnya kekuasaan Negara model Eropa, yakni bercorak politik di Eropa Kontinental. Dilihat dari perspektif sejarah—dalam konteks masa itu adalah kehendak untuk terciptanya tatanan, keamanan dan kemakmuran rakyatnya. Di sini terkesan sangat dipentingkan kuatnya otoritas dan kendali negara. Kata kuncinya antar lain “membangun negara” (*state building*). Model Eropa, dengan ciri-ciri kuatnya kekuasaan koersif, dengan personil yang terlatih serta organisasi yang bersifat birokratis, teriluminasi ke-negara-negara dunia ketiga.

Urgensi ini juga berkait dengan solusi yang salah juga dalam konseptualisasi tentang modernisasi bagi negara dunia ketiga. Rujukannya adalah bangsa-bangsa yang kini moderen (Samuel dan Valenzuela, 1978); kepustakaan pembangunan politik yang ada adalah etnosentris (Migdad, 1983). Bagaimana resep resep pem-Baratan ini dapat hinggap di sebagian ilmuwan sosial dan politik; padahal di era itu tengah tumbuh “kesadaran ideologis” di masyarakat bangsa bangsa dunia ketiga untuk memiliki identitas diri ? Untuk ini Almond menuliskan rasa herannya, dengan mengutip Pye,

“.....In the meantime, however, as the West gradually learned to appreciate and symphatize with cultural differences, many of the spokesmen for the non-Western world have become increasingly impatient with their own traditions and have insisted that it is their right and duty to change their societies to make them more like the industrial world...”

(Almond, 1987; 447)

Urgensi ini untungnya oleh beberapa aktor negara di beberapa rezim seperti di Malaysia, Thailand, dan Singapura dapat diisi secara visi – tanpa diperkuat “mitos”atau filsafat baru tentang Negara. Kemunculan “strong state” pada kasus Thailand, Malaysia, dan Singapura amat menarik karena seperti menolak asumsi asumsi yang dianut teori hubungan internasional umumnya, seperti model psikologis, model dominasi Negara maju atau

model reduksionis—model model ini umumnya yakin atas “ketidak-sederajatan” Negara berkembang vis-à-vis Negara maju. Tapi bagi banyak negara, ‘kekosongan paradigma’ ini dapat menjadi krusial antara lain akibat beberapa hal strategis :

- (1) visi para aktor Negara yang salah kaprah dalam berkompromi dengan kekuatan globalisasi (pasar dan aktor Negara pro-pasar);
- (2) ketiadaan visi yang secara *ad hoc* mengisi kekosongan paradigma tentang Negara; dan
- (3) para ilmuwan sosial yang salah kaprah merekomendasi reformasi yang tidak *workable* sesuai taraf perkembangan dan sejarah masyarakat sendiri.

Banyak ilmuwan social—akibat keterpukauan gaya berperadaban global—terlalu bersikap menerima tanpa daya nalar dan kritis atas tesis, prediksi, atau teori-teori sosial yang timbul di masyarakat-masyarakat negara maju. Jika dikatakan bahwa sejarah telah berakhir (= menangnya demokrasi liberal dan kapitalisme), maka proposisi prediktif ini makin lama dapat semakin menjadi proposisi preskriptif dengan konsekuensi-konsekuensi turunannya. Mengapa berbahaya? Karena sikap dan doktrin monokultur sedemikian ini tentu saja berlawanan dengan hakekat kemajemukan alamiahnya proses-proses memberi, menerima, (sedikit, sebagian, dan lain-lain) elemen satu budaya ke/dari budaya lain di Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Kiranya senada dengan Isiah Berlin yang mendorong penerimaan pada pluralisme (namun dalam prakteknya diplintir dengan meminggirkan golongan golongan agama yang taat), Jepang mulai 1980-an juga mengembangkan apa yang disebut simbiosis gaya Tao, yakni *kyosei*—sebagaimana dijelaskan Prof. Bey Arifin (2001). Nilai *kyosei* mungkin merujuk ke harmoni ketimuran; namun di era Jepang modern nilai konservatif ini ditemukan kembali untuk menyokong gagasan hubungan yang saling menghormati. Menurut Arifin, adalah Utada Kastuhiro yang menelusuri nilai Jepang kuno ”*as against Darwinism and 'ruthless' capitalism*” (Arifin; 2001, 33). Pengembangan ilmu sosial di Jepang ini kiranya juga sejalan dengan konsepsi teoretis bidang ilmu politik dari Philpott untuk suatu transformasi ke dalam demokrasi dalam konteks Asia Tenggara. Di Indonesia, misalnya. Nampaknya ada problem teoretis bahwa reformasi yang sudah kita praktekan mendasarkan pada reformasi

kebablasan hasil resep ilmuwan politik yang kebablasan. Sebenarnya ada satu pendekatan yang lain yang disebut *authoritarian governability* – yang intinya (a) menolak dikotomi perspektif teoretis Otoritarianisme vs. Demokrasi, dan (b) mencoba melihat Indonesia dengan perspektif teori yang mengacu kepada realitas kultural dan tahap perkembangan masyarakat”. Pendekatan ini dikemukakan oleh Simon Philpott (2000) dalam buku *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoriterianisme*. Ada tiga konsep utama yang dijadikan dasar Philpott bagi gagasan teoretis tentang Meruntuhkan Cara Pemahaman Indonesia yang selama ini. Yakni konsep pemerintahan, konsep *governability* dan perspektif teori tentang biopolitik. Untuk yang disebut terakhir, ia menggambarkan bahwa sejarah dan tahap perkembangan kultural di Eropa juga mengenal jenis jenis *governability* yang bercorak otoriterian sedemikian itu. Tulisnya,

“Pada intinya, biopolitik ini tidak secara langsung menyoal praktik-praktik demokrasi dalam pengertian umum seperti sekarang. Biopolitik ini lebih banyak membahas berbagai pertanyaan tentang keteraturan, stabilitas, disiplin, dan produktifitas.”

Philpott pertama mengacu pada apa itu konsep pemerintahan –yang dia rujuk ke definisi Rose dan Miller (1992), yang kandungannya termasuk aspek rasionalitas politik. Jika di Barat “Liberalisme menjadikan realitas sebagai hal yang masuk akal” maka jenis idiom tertentu harusnya juga tersedia, yang menjadikan realitas sebagai hal yang masuk akal di Indonesia. Konsepnya yang lain adalah *governability* – yang dirujuk Philpott ke konseptualisasi dari Rose dan Miller juga. Atas dasar dua konsep ini – ditambah dengan perspektif teori tentang biopolitik dari Du Bois (1991) – Philpott melihat bahwa *Meruntuhkan Indonesia* berarti bahwa pendekatan dikotomis liberal vs. otoriterian hendaknya diganti dengan *governability* otoriterian. Jika solusi ini diterima maka implikasinya adalah bahwa pemerintahan yang *workable* jangan terjebak pada idealisasi demokrasi membabi buta; juga, sebaliknya, tidak berkuat pada konservatisme kultur otoriter – melainkan dicari cara pendekatan bagaimana bekerja di tengah situasi yang ada, yakni melakukan semacam *management conflict* di sisi.

Keterpukauan ilmuwan sosial dan politik antara lain pertama, oleh “resep” telah berakhirnya peran ideologi besar bagi basis perubahan dan perbaikan politik. Teori ilmu politik sudah “menggusur” filsafat dan ideologi. Dalam konsep besar ini, “filsafat” dipandang tak lagi ada dan sudah dilebur

ke dalam wilayah teori—dengan ini implisit tidak signifikannya lagi konsepsi konsepsi turunan dari filsafat: seperti ideologi (politik) dan “pemikiran politik”.

Kedua, diterimanya bentuk perubahan bercorak inkremental, *incremental change*. Dalam teoretisasi ilmu politik, salah satu pengaruh “perkembangan” masyarakat demokrasi liberal (Barat) adalah tahap de-ideologisasi. Tahap ini diyakini bahwa sudah tidak ada lagi ruang bagi alternatif ideologi besar, “perubahan-perubahan dan penyempurnaan aspektual dan sub-sistem, *yes*”. Oleh Robert A Dahl dan Lindbloom, perubahan bertahap ini disebut inkrementalisme. Sementara oleh Popper disebut *piece meal engineering*. Pendek kata, di sini tidak ada lagi yang namanya ‘revolusi’ atau pun *fundamental reform*. (Varma, 1987; 132 – 145).

Mengapa keterpukauan ? Karena kita lantas menelan ide(ologi) liberalisme secara implisit. Karena idealisme untuk merubah dan memperbaiki tata sosail ekonomi seolah olah melawan liberalisme, melawan ekonomi pasar bebas. Harusnya diterima ide tentang keanekaragaman ide dan ontologi.

Bahwa konsep peradaban (*civilization*) memang signifikan: dinamika pengidentitasan baru secara lintas-batas negara-bangsa tengah berlangsung—yang melampaui identitas nasional. Dan dinamika ini tentu memunculkan tensi, konflik dan benturan. Tapi dengan mengutip Richard Falk (2004), konsep ini hendaknya dilihat sebagai fenomena apa adanya (*as it is*), tak perlu dilebih-lebihkan (*as it should be*), menjadi preskripsi dan doktrin yang menegaskan eksistensi kebudayaan yang beragam. Misal, “Awat, ada bahaya. Kita harus curiga. Kita tangkal sebelum terlanjur menjadi kuat”. Sikap dan ide(ologi) sedemikian itu, meminjam perspektif Rocard, mencerminkan pemihakan kita kepada paradigma usang tentang kuasa Negara-bangsa, yang kini ompong dan karena itu perlu diisi dengan *Reasons of State* yang lebih etis.

Seiring dengan dinamika pengidentitasan baru berbasis peradaban-peradaban besar, paradigma korporasi atau pasar nampaknya juga kini makin disoroti secara kritis. Gagasan *Open Society* dari Popper dan kini di ‘*mass production*’ oleh Soros untuk satu hal, mencerminkan kesadaran memperbaiki dan koreksi, lagi-lagi bukan dalam kerangka-kerja alternatif ideologi.

5. Anomali dan Tindak Teror

Dominasi oleh korporasi global di berbagai bidang kehidupan dan tindak pembelaan diri dan perlawanan pihak-pihak yang terdominasi menghasilkan anomali. Adalah dalam perspektif kekosongan paradigma tentang Negara dan pertanyaan benarkah Negara digerogeti globalisasi di atas, persoalan-persoalan yang berat seperti terorisme hendaknya kita pahami. Bahwa ada barbarisme dalam perwujudan kuasa negara-bangsa, bahwa demokrasi dan universalisme tiba-tiba disadari sebagai barang mahal yang alot diwujudkan oleh tata politik global yang berkeadilan (*global justice*). Bahwa kapitalisme korporatis global kemudian terlalu mendikte masyarakat (*society*) dan Negara (*State*).

Mengapa terorisme ditempatkan dalam konteks menggugat paradigma lama ini ?

Karena ada yang disebut perang memperebutkan sumberdaya (*resources wars*), terutama dari fosil di bumi; dalam segi ini kompetisi membabi buta dan barbarik potensial dan aktual muncul dan yang terkena imbasnya adalah penduduk pribumi tempat sumberdaya ekstraktif itu berada. Ini adalah bentuk teror oleh sektor Pasar dan Negara-kosong-etika. Di sini, tesis tentang konflik adalah persoalan ekonomi dan politik. Karena ada gerakan perlawanan lokal dan nilai budaya-agama setempat dari serbuan invasi korporatisme dan pembangunanisme—yang sering didukung negara-bangsa (rezim berkuasa) di negara berkembang maupun di segmen segmen masyarakat di negara industri maju. Perlawanan-perlawanan ini, disebut Benjamin R Barber, sebagai Jihad, dilihat dari sisi kepentingan Pasar dan negara sebagai tindak teror

Tapi juga ada perumusan masalah konflik yang lain lagi, bahwa pemicu tensi dan konflik, bahkan teror, yang sumbernya berpangkal pada semacam keyakinan ”teologi politik” atau ideologi politik yang berakar pada suatu paham teologi keagamaan tertentu. Di sini tesis tentang konflik adalah keyakinan agama dan lalu konflik politik dan militer. Yakni apa yang oleh Noam Chomsky—ilmuwan sosial kiri (?)—sebut *the fateful triangle*, dalam tulisannya “The Road to Armageddon” (Jalan menuju Perang-yang-ditakdirkan-terjadi pra Hari Kiamat), segitiga yang dapat bersifat eksplosif memicu konflik lokal, regional bahkan A.S dan dunia. Tiga pihak dalam “perang segitiga” itu adalah Israel, Amerika dan Palestina. Jika tesis ini lebih kuat sebagai faktor pemicu konflik global, maka kita mungkin dapat

mencatat ketiga bangsa dan Negara-bangsa ini adalah, sebut saja, pewaris terdekat peradaban Semit: perang multi-dimensi berakar pada teologi antara segi tiga Palestina—Israel—Amerika. Perang ini berdampak ke berbagai wilayah dunia dan terjadinya bentuk bentuk teror.”Teologi politik” yang dianut Presiden AS yang baru lalu, George W.Bush sendiri menurut LSM Bush Watch—yang merujuk ke berbagai pernyataan Bush di berbagai kesempatan—amat sarat dengan keyakinan-keyakinan dasar sekte keagamaannya. Misal sekte Evangelist, terutama pada kasus Bush; Bush mengaku bahwa perang terhadap terorismenya adalah perintah Tuhan. (Web site Bushwatch. Akses 11/8/2009). Salah satu opini yang dikutip Bush Watch itu diberi judul Perang Iraknya Bush yang Evangelikal merupakan *’dress rehearsal for Armageddon’*, yang dikutipnya dari kata-kata kepala Tim Doa Jerusalem, Evans. Untuk hal ini, seorang Jimmy Carter, mantan presiden AS, dikutip oleh Web site ini, menolak perang suci Bush di Irak ini, yang dikatakannya tak sesuai dengan keyakinan universal hampir seluruh pemimpin pemimpin agama—kecuali kaum yang tergabung dalam Southern Baptist Convention *”who are greatly influenced by their commitment to Israel based on eschatological, or final days, theology.”* (Catatan kita adalah bahwa pendirian Carter bahwa perang Irak ini tidak sesuai standar akan prinsip-prinsip suatu perang yang adil (*principles of a just war*) mengingatkan kita kepada kritik A Shomali yang dipaparkan terdahulu, bahwa secara etika non-relativitas, kita mesti berani melihat bahwa perang Irak itu secara moral adalah salah dan buruk).

Kosakata Armageddon sendiri di Barat nampaknya begitu berpengaruh sampai-sampai situasi gawat ekonomi Amerika yang terlilit hutang akhir tahun 2009 ini digambarkan oleh Robertson dalam *”Inflation Risk without Foreign Debt Buyers”* (Web site cnbc.com. akses 11/25/2009) sebagai kiamat atau Armageddonnya Amerika. Jakni jika hutangnya tidak ditalangi oleh RRC dan Jepang.. Kemudian, dalam *”Armageddon Time”* Forbes.com. Peter Robinson memaparkan analisis Hanson dan Baer² sekitar krisis ”peradaban bangsa bangsa Semit (?) di Timur Tengah yang gawat. Analisisnya menyajikan lima (5) proposisi: (1) *”(if not already capable of doing so), Iran will be able to produce nuclear weapons in mere months”*; (2) *”The Iranians have no interests in running a bluff, once able to produce*

² Victor Davis Hanson adalah sejarawan militer; Robert Baer dulunya merupakan komandan lapangan dinas rahasia AS, CIA.

nuclear weapons, they will almost certainly do so"; (3) *"As the Iranians scramble to produce newclear weapons, the Obama administration appears too teckless, inexperienced or deluded to stop them*"; (4) *"Israel cannot tolerate a nuclear Iran"*; (5) *"Iran would retaliate.... but encourage Hezbollah to a civil war in Lebanon"*. Dalam "Armageddon: Pertempuran Akhir Zaman" (Web site Gema Insani Online. Akses 11/25/2009: dipaparkan sumber sumber klasik Islam dan sumber al-kitab Bibel dari Kristiani yang intinya adalah tentang peperangan di akhir zaman—yang dalam doktrin kedua agama tersebut yang akan dikalahkan dan hancur adalah Yahudi. Sementara itu, dari sumber Islam, Rasul Muhammad diberitakan menyebut perang akhir zaman itu dengan *al-malhamah al-kubra*, yang oleh web site ini diterjemahkan dengan "huru hara besar yang belum pernah ada tandingannya"; peperangan itu sendiri dinamakan *al-majidun* (Perang Kemuliaan). Dalam pada itu, dalam sumber Bibel dirujuk kitab Yehezkiel ayat 7:15 dan 11—24.

Dari deskripsi tentang armageddon di atas, ada indikasi kuat bahwa hiruk pikuk barbarisme masa kini—dalam sudut pandang "peradaban agama agama Semit"—merupakan konflik yang memang *pre-determined*, perang antar anak cucu bapak monoteisme, Ibrahim AS.³.

Fenomena, realitas dan pengertian tentang terorisme itu sendiri amat kabur. David Austen (2003), misalnya, dengan kekacauan data dan interpretasi atas data membuat kita amat bingung. Di satu sisi Austen mengaku tidak memperoleh data dan informasi tentang terorisme dari CIA, dinas rahasia pemerintah pusat AS. Tapi di sisi lain Austen yakin tentang mustahilnya peran CIA dalam kaitan terorisme di dunia, seperti ditulisnya;

"Tetapi tentunya bukan CIA yang telah mengadakan kamp latihan gerilyawan bagi puluhan ribu teorist di Kuba, Aljazair, Libya, Suriah, Libanon, Yemen Selatan, Korea Utara, Jerman Timur, Hungaria, Czechoslovakia, Bulgaria dan Uni Sovyet...." (Austen, 2003; xii)

³ Kata armageddon sendiri, menurut Gema Insani Online, berasal dari bahasa Yunani; tapi arti harfiahnya diuraikan bahwa Ar (bhs Ibrani/Hebrew.=Har adalah gunung; Mageddon=nama kota kuno di wilayah Israel utara, kota di pegunungan Samaria. Di Barat, armageddon merujuk ke pembahasan hari akhir dunia, juga termasuk soal jatuhnya meteor raksasa ke bumi.

Catatan kita adalah bahwa konklusi Austen ini salah logika. Seperti salahnya cara pikir ini: Aku yakin Batam lebih rame dari Jakarta. Ketika ditanya, 'apakah engkau yang sudah mengenal Jakarta sudah pernah pergi ke Batam?', dijawabnya bahwa ia belum pernah pergi ke sana.

Karena terorisme itu dapat manifes tapi juga laten. Menyetujui Arendt, seorang *santri* (pelajar agama di sistem pendidikan pesantren di Jawa) yang kenal dengan beberapa aktor teror (dalam definisi pejoratif) di Indonesia menulis '*I agree with Arendt that anyone could be involved in terrorism especially if the environment shapes the conditions*' (Noor Huda Ismail, 2005). Paradigma "Awas hati-hati. Ada si Hitam. Ada si Putih", sebagai wujud dari paradigma lama (teologi politik model Augustinus dan doktrin politik kaum Realis) masih dipakai di banyak 'bangsa beradab'. Oleh Richard Falk (1997; 63 -76) di Amerika dan Barat berlangsung terjadinya fakta fakta dan praktek "penyingkiran Islam"; ini berarti ada persoalan tentang universalisme, sebagai ide dan praktek universalisme yang keliru selama ini di Barat. Mengapa ? Karena universalisme yang benar harusnya memberi ruang setara dan berkeadilan bagi partisipasi yang datang dari berbagai peradaban (non-Barat). Misalnya lagi, politik diskriminatif, legal maupun prasangka kultural di AS selama dua ratus tahun, berdampak negatif bagi orang Muslim Amerika: misal, dari segi mental psikologis, banyak muslim Amerika *ogah* masuk kerja di militer AS karena khawatir perlakuan yang tidak *fair*, seperti dilaporkan Bernd Debusmann, "*Fear of bias keeps U.S. muslims out of military*". Bahwa prasangka etnis memang fenomena universal tapi situasi anomali etik di pergaulan global adalah amat berbahaya. Miskonsepsi bahwa Islam radikal sebagai ancaman agaknya juga menjadi faktor ketegangan—sementara itu pemahaman kita tentang akar-akar konflik global boleh jadi tidak tepat. Seorang profesor, Robert Wright⁴, misalnya mengingatkan kita bahwa *information-driven* dan *technology-driven* yang ada dalam "globalisasi" adalah sumber inheren munculnya ruang bagi kekerasan dan tindak teror; sejumlah proposisi telah ia buat untuk ini. Kita ambil beberapa: Proposisi No 1 "Al-Qaida dan Islam radikal bukanlah sebagai masalah"; Proposisi No 2 "Untuk Hari Esok yang dapat terbaca, makin kecil kelompok yang militan akan punya kemampuan membunuh makin banyak orang"; Proposisi No 3 "Jumlah kelompok militan akan

⁴ Robert Wright (2002), "A Real War on Terrorism" <http://www.slate.com/> akses 1/12/2009.

hampir pasti tumbuh di dekade dekade mendatang akibat kecepatan perubahan teknologi, dan akibat sosialnya”; Proposisi No 4 ”Jumlah ketidakpuasaan di dunia menjadi makin amat signifikan”; Proposisi 5 “Fase evolusi IT kini adalah anti-kekangan”; Proposisi 6 “Masalahnya bukan pada fakta adanya orang miskin, tapi pada fakta adanya bangsa miskin”.

6. PENUTUP

Ideologi globalis yang dominan agaknya akan terus berupaya merasuk mempengaruhi entitas Negara sedemikian rupa sehingga para aktor Negara dan Masyarakat sepertinya harus menyerahkan kadaulatannya. Barbarisme yang bermunculan di berbagai kebudayaan dan konflik berdarah di kebudayaan bangsa Semit juga menghadang Negara dan Masyarakat untuk berupaya menangani dengan baik. Oleh karena itu, konsepsi dan redefinisi tentang Negara diperlukan untuk menjawab tantangan dominasi globalisasi dan memperkecil tindak-tindak barbarisme dan teror.

Yang diperlukan adalah rancangan-rancangan program aksi yang diorientasikan ke arah hal-hal sebagai berikut : (1) proses bertahap transformasi sosio-budaya (dari gaya berperadaban yang fundamentalis ke gaya yang makin moderat dan toleran). (2) perlunya pemikiran untuk tinjau-ulang tentang paradigma tentang Negara sebagaimana direkomendasi Michel Rocard (dengan implikasi gugatan atas pendekatan dan metodologi ilmu politik—termasuk tantangan ke arah integrasi etika dengan politik, review kritis atas epistemologi berbasis benda *matter-based epistemology* yang kini dominan; (3) keberanian melakukan *overhaul* di bidang politik pembangunan dan kebijakan publik; dan (4) perlunya didorong lebih intensif dan ekstensif bagi berbagai segmen komunitas global untuk memperbesar kesadaran hati nurani.

Dalam hal yang disebut nomor 3, tentang politik pembangunan dan kebijakan publik, maka untuk Indonesia, salah satu isu prasyaratnya adalah kebutuhan untuk tinjau ulang konsep teoretis tentang pembangunan politik (*political development theories*) itu sendiri, sebelum melakukan politik pembangunan (*development as a political decision, policies and programs*). Kiranya amat diperlukan bagi kemunculan para ilmuwan sosial politik yang bijak-arif untuk tidak terpujau dengan kemapanan dan hegemoni ilmu atas nama demokrasi, dengan mengabaikan dinamika dan konteks pertumbuhan budaya dan antropologis-sosiologisnya. ***.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A., 1987. "The Development of Political Development", dalam Myron Weiner & Samuel P. Huntington, eds., *Understanding Political Development*, Boston : Little Brown and Co.
- Anggoro, Kusnanto. 2001. "Memisahkan Negara dari Rakyat" (Kata Pengantar), Dalam Lukas Luwarso. *Negara Dalam bahaya: Kontroversi Seputar RUU PKB*, Jakarta: ELSAM.
- Arifin, Bey. 2001. "The Taming of Globalization: A Call for A New Paradigm", dalam Jurnal *Ilmu dan Budaya* Jakarta, UNAS.
- Baasir, Faisal, 2003. *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*. Kata Pengantar Jimly Ashsiddiqie dan Azyumardi Azra. Jakarta: Sinar Harapan.
- Barber, Benjamin R (1995) *Jihad vs McWorld: How Globalism and Tribalism are Reshaping the World*.
- Budiardjo, Miriam. 1992. "Pengantar" dalam ARZ. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chan, John. 2002. "China's 'War on terrorism'—brutal repression of ethnic unrest in Xinjiang" dalam *World Socialist Web Site*. Website. Akses 11/6/2009
- Cook, Robin. 2006. "Why U.S. neocons dislike Kofi Annan" dalam *The Jakarta Post*, 7 April.
- Chomsky, Noam. 1999. *The Fateful Triangle: The U.S, Israel and the Palestinians*. (Updated ed.) Cambridge: Mass, South End Press.
- Dahl, Robert A. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Terjemahan A Rahman Zainuddin, Jakarta: YOI.

- Debusmann, Bernd "Fear of bias keeps U.S. muslims out of military" dalam *The Jakarta Post*
- Falk, Richard.1997. "Geopolitik Penyingkiran Islam", dalam *Ulumul Quran* Vol VII 6.
- Friedmann, Thomas L. 1999. "Opening Scene: The World Is Ten Years Old", dalam *The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization*, Updated and Expanded Edition), New York: Farrer Strauss Giroux.
- Hefner, Robert W. 2001. "Pendahuluan" *Islam dan Demokratisasi: Civil Islam*. Jakarta: The Asia Foundation – ISAI.
- Jacob. T. 2004. *Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis: Catatan di Senjakala*. Jakarta: YOI.
- Kosei, Morimoto. 2002 "The Destruction of the Bamiyan Buddhas and 11 September: A Historical Perspective", dalam *Goiku Forum: Japanese Perspectives on Foreign Affairs*.Chiyoda-ku, Tokyo: Toshi Shuppan.
- Miaill, Hugh, et.al., eds. , 1999. *Contemporary Conflicts Resolution* , Cambridge: Polity Press.
- Mujtaba, Syed Ali. 2008. "Nationalism In An Age of Globalization—An Indian Experience",. Website: indianmuslims.in/ akses 10 Nop 2009
- Murbawi. 2007. "Negara Cenderung Lepas Tangan". *Media Indonesia*, 15 Maret
- Nadia, Ghia. 1992. "Nationalism and Democracy", dalam *Journal of Democracy*, Vol 3 (4) October.
- Novak, Michael. 2006. "Pilar-pilar Politik, Ekonomi, dan Moral untuk Kebebasan" (Wawancara). *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 7 (2), Juli-Des.
- Philpot, Simon. 2003. "Governabilitas Otoriterian: alternatif untuk memahami Indonesia ?", dalam Philpott, *Meruntuhkan Indonesia*, Jogja: LKIS.

- Potucek, Martin. 2008. "The Concept of Neo-Weberian State Confronted by the Multi-dimensional concept of governance". Website: adobe reader (nws-government.pdf) .. Akses 5/08/2009
- Riyadi, Eddie.2007. "Gula-gula Dunia Bisnis". *Media Indonesia*. 15 Maret 2007
- Rocard, Michel. 2004. "The Good fallout from Iraq", *The Jakarta Post*. 7 Agustus.
- Shiva, Vandana. (Thn ?) "Bio-ethics: A Third World Issue" Website: native web/pages/legal/shiva.html. Akses 14 Nop 2009.
- Shomali, Mohammad A. 2005. *Relativisme Etika: Menyisir Perdebatan Hangat dan Memetik Wawasan Baru tentang Dasar-dasar Moralitas*. Pengantar A Harry Lesser. Penerjemah Zainun Am. Jakarta: Serambi Ilmu Sejahtera.
- Sikh, Jagmohan. 2009."Separatism and terrorism versus insurgency and independent", dalam *World Sikh News*. Monday Nov 23. website:wordlsikhnews. 11/8/2009.
- Smith, Anthony L. 2004. *Trouble in Thailand's Muslim South: Separtism. Not Global Terrorism*. (Asia-Pacific Security Studies. Volume 3 (10), Desember 2004.
- Susetyo, Benny. 2004. *Hancurnya Etika Politik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Varma, SP. 1987. *Teori Politik Modern*, Penyunting Tohir Effendy, Jakarta: Rajawali.
- Tumin, Makmor & Robi Nurhadi. 2007. "Perspektif Ontologis Masyarakat Sipil". *Ilmu dan Budaya*. Jakarta—UNAS. Vol 27 (4) Pebruari 2007.
- Wolf, Martin.2001. "Will the Nation-State Survive Globalization ?" dalam *Foreign Affairs*. January/Feb. 2001